

TAJUK RENCANA

Terapkan WFA Demi Layani Wisatawan

ADA hal menarik dalam soal penerapan kebijakan Work from Anywhere (WFA) menjelang Lebaran 2025. Secara nasional, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 2 Tahun 2025, yang isinya memberi fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari mana saja pada 24-27 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan saat arus mudik, terutama di Pulau Jawa. Namun, Pemda DIY ada kebijakan tersendiri yang berbeda dengan SE Menpan RB No 2 Tahun 2025. Pemda DIY tidak menerapkan kebijakan WFA bagi ASN dalam libur Lebaran mendatang (KR 19/3). Mengapa Pemda DIY tak menerapkan kebijakan WFA? Alasannya sangat masuk akal, bahkan sangat berorientasi pada kepentingan publik. Pemda DIY ingin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama dalam menyambut wisatawan ke DIY. Pemda DIY juga ingin memastikan layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, misalnya layanan kesehatan, panti sosial dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita bisa memahami alasan Pemda DIY yang tidak menerapkan WFA, mengingat tidak semua sektor dapat dilayani secara remote, misalnya sektor wisata dan kuliner. Sektor ini masih membutuhkan interaksi fisik. Tak hanya itu, masih ada sektor di pemerintahan yang mengadakan administrasi berbasis dokumen fisik. Bahkan, kehadiran fisik menjadi indikator utama produktivitas. Hemat kita, penerapan WFA tetap ada plus minusnya. Posisinya tentu pada aspek praktis dan efisien, karena pekerjaan bisa dilakukan di manapun berada. Sedang

minusnya, terkait dengan sistem pengawasan atau monitoring yang kurang efektif, apalagi untuk jenis pekerjaan yang butuh koordinasi tetap muka langsung. Dampak selanjutnya, produktivitas menjadi menurun lantaran monitoring tidak berjalan efektif. Ini problem dan tantangan yang harus dihadapi instansi yang menerapkan WFA. Kita tetap mengapresiasi langkah Pemda DIY yang tidak menerapkan WFA demi memberi pelayanan optimal kepada masyarakat, terutama wisatawan yang berkunjung ke DIY. Seperti tahun-tahun sebelumnya Yogya selalu diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Hampir semua destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Targetnya, mereka tidak hanya berkunjung saja, melainkan juga membelanjakan uangnya di DIY, sehingga roda perekonomian terus berputar. Bagi pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, kuliner, terutama UMKM, inilah saatnya untuk berburu rezeki melimpah. Syaratnya, mereka harus memberi pelayanan yang optimal kepada pengunjung atau wisatawan. Tak boleh lagi ada cerita pedagang yang nuthuk harga yang notabene membuat konsumen kesal dan merasa kapok berbelanja. Inilah yang harus mendapat perhatian dari para pelaku usaha maupun stakeholder. Dalam kaitan itulah kita bisa memahami mengapa Pemda DIY tidak menerapkan kebijakan WFA menyambut Lebaran tahun ini. Dengan kata lain, ASN diminta all out melayani wisatawan. Tentu ini membutuhkan persiapan yang matang. Bikinlah mereka betah tinggal di Yogya, dan kalau perlu menghabiskan uangnya di Yogya. Pelayanan yang prima dan manusiawi akan membuat mereka semakin betah di Yogya. □ - d



PADA tahun 1941, Hannah Arendt menulis *Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil*. Tulisan ini menceritakan tindakan Adolf Eichmann, seorang anggota rezim Nazi yang menjadi arsitek pembantaian massal yang diceritakan lebih dari 11 juta orang menjadi korbannya. Eichmann bersedia dengan sadar bergabung dalam program pembantaian manusia dan kesediaan tersebut memperlihatkan kegagalannya dalam berpikir dan menilai tindakannya. Kekejaman Eichmann dalam Holocaust dapat dikaji sebagai bagian persoalan psikologis, di mana ia merupakan seorang manusia normal, tetapi ketika dilihat dari sudut kesadaran dan nurani, ia bertindak tanpa berpikir dan menjalankan perintah atasan tanpa memikirkan akibat-akibatnya pada korban.

Penelitian Hannah Arendt masih relevan untuk melihat perilaku pejabat kekuasaan hari ini, di mana kerap ada kebijakan yang memperlihatkan sisi sewenang-wenang pegang kekuasaan. Merujuk pada tindakan Eichmann, kekuasaan memiliki daya yang kuat sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya dapat dengan mudah melepaskan keberpihakannya pada orang-orang yang lemah, tidak dapat menimbang benar atau salah, dan manafikan nasib korban. Dalam beberapa studi, banalitas kejahatan di tubuh kekuasaan akan berjalan tanpa kendali dalam sistem politik tirani, di mana pemerintahan dijalankan secara absolut oleh penguasa. Pertanyaannya, bisakah banalitas kejahatan terjadi dalam sistem demokrasi? Idealnya tidak terjadi, karena keputusan politik dalam sistem demokrasi ditentukan kehendak rakyat. Namun, praktik kekuasaan kerap berbeda. Ada banyak kebijakan dikendalikan oleh sekelompok kecil elite yang mengarah pada sistem politik aristokrasi dan oligarkhi. Bahkan di masa orde baru, kekuasaan dijalankan dengan otoriter di tengah sistem politik demokrasi.

M Syafi'ie

Kekuasaan Saat Ini
Apakah pemerintahan saat ini telah menjalankan banalitas kekuasaan? Apakah aparat negara menjalankan perintah total penguasa tanpa memikirkan baik-buruk kebijakannya? Pertanyaan ini perlu diuji dengan bukti bagaimana kekuasaan saat ini bekerja. Sejauh ini, sangat terasa komando yang sentralistik diperagakan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan pertahanan-keamanan terlihat nyata. Para anggota kabinet dan kepala da-



KR-JOKO SANTOSO

erah didoktrin dengan gaya militer. Dalam konteks kebijakan, apa yang dikehendaki Presiden seperti ini tidak ada yang berani mengkritisi, bahkan suara kritis para wakil rakyat hanya menasar perilaku Menteri, tidak berani mengkritisi penguasa utama. Gaya pemerintahan saat ini mengkwatirkan. Tidak terbayang semua kebijakan harus tunggal dan fungsi *check and balances* cabang-cabang kekuasaan tidak berjalan. Kekuasaan yang sehat idealnya menghadirkan komunikasi intersubjektif, di mana orang-orang yang bekerja di tubuh kekuasaan dapat berkomunikasi tanpa ketakutan, pejabat yang berada di ragam cabang kekuasaan tetap menjaga nalar kritis, dan antara satu dengan yang lain saling menjaga marwah fungsi pokok kewenangannya agar keseimbangan

kekuasaan tetap terjaga. Presiden dan pelaksana kekuasaan eksekutif harus dikritisi agar program-program pemerintahan tidak jatuh pada kesewenang-wenangan. Kondisi kekuasaan yang tersentralisasi dan komunikasi komando yang begitu kuat seperti telah mematikan kesadaran kritis para pejabat kekuasaan. Kondisi ini walau tidak serupa pernah terjadi di era kekuasaan demokrasi termimpin dan orde baru, di mana negara waktu itu dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa tertinggi dan negara kemudian jatuh pada otoritarianisme. Di era demokrasi termimpin, DPR hanya bertugas menjadi legitimasi terhadap keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Keadaan serupa terjadi di era rezim orde baru, di mana pemerintahan kemudian menjelma sebagai kekuasaan teror (*state terrorisme*) yang secara sistemik melakukan penundukan terhadap masyarakat sipil dengan kekuatan ABRI, serta berlanjut dengan pembuatan aturan dan kebijakan yang membungkam kritik, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Untungnya saat ini masih ada masyarakat sipil yang berani berpendapat. Beberapa suara kritis antara lain perihal kebijakan efisiensi anggaran yang salah kaprah, pajak yang naik, gelombang pemutusan hubungan kerja, tidak jelasnya komitmen negara terhadap permasalahan HAM, dan revisi RUU TNI yang menjadi penanda absah hadirnya rezim neo orde baru. Suara kritis masyarakat sipil adalah harapan satu-satunya di tengah kekuasaan yang mengarah pada sistem otoritarianisme. (*)-d

*)M Syafi'ie, Dosen Fakultas Hukum UII.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisariss Utama: Imam Satriyadi, SH.
Komisariss: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanrkryk23@yahoo.com, iklanrkryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banjumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Indonesia Terang: Tetap Optimis Membangun Masa Depan yang Cerah



TAGAR
#IndonesiaGelap mendadak menjadi trending di media sosial X (Twitter) pada 17 Februari 2025, dengan ribuan unggahan yang membahas aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu ini kemudian ramai direspons netizen sebagai cerminan keresahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dari dunia maya, gerakan Indonesia Gelap berpindah ke jalanan dengan dilakukannya unjukrasa mahasiswa pada 17 Februari 2025 di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Tidak berhenti di situ, pada 20 Februari 2025, gerakan unjukrasa juga masih berlanjut di berbagai kota, termasuk Kota Yogyakarta yang digadang sebagai puncaknya. Unjukrasa pada 20 Februari 2025 yang diinisiasi kembali oleh BEM SI ini dipilih karena bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah terpilih, sehingga massa juga ingin memberikan "pesan" kepada kepala-kepala daerah terpilih.

Indonesia Terang

Di sisi lain terdapat gerakan dengan narasi berlawanan, yaitu Indonesia Terang. Tagar ini belum masuk dalam 30 teratas Trending X per 20 Februari 2025. Namun berdasarkan analisis tagar, gerakan ini sudah menjangkau 123,800 akun di media sosial, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X (brandmentions.com, 20/2/2025) dengan 31,185 jangkauan di X (dash.twitterbinder.com, 20/2/2025). Gerakan lawan ini menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikritik sebelumnya berusaha memperbaiki keadaan Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, atau narasi tentang komitmen Presiden Prabowo untuk rakyat. Sebagai negara yang mengedepankan

Harman Nugroho

demokrasi, semua opini baik Indonesia Gelap dan Indonesia Terang adalah bentuk dari kebebasan berpendapat. Ini adalah hak asasi manusia sebagaimana juga dilindungi dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, menjadi normal untuk ruang publik untuk dipenuhi berbagai ekspresi dari berbagai perspektif, yang berlawanan sekalipun. Meski demikian, pilihan diksi Indonesia Gelap (*dzulmatun*) tersebut dinilai tidaklah tepat dan berpotensi bahaya secara spiritual. Secara hakikat menutupi (*Kufri*), mengabaikan limpahan berkah, rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Pada aspek keamanan sosial, diksi Indonesia Gelap lebih cenderung bermotif provokatif dan membuka peluang pintu secara luas aksi agitatif-destruktif.

Tetap Optimis Indonesia Maju

Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara maju. Dengan sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, dan masyarakat yang dinamis, Indonesia memiliki semua komponen yang diperlukan untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Ekonomi Indonesia telah tumbuh dengan stabil, dengan pertumbuhan GDP yang konsisten di atas 5%. Selain itu, Indonesia juga telah membuat kemajuan yang signifikan dalam bidang infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dan bandara telah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di selu-

ruh negeri. Ini telah membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, meski Indonesia memiliki banyak kelebihan, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Korupsi, kemiskinan, dan ketidakesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, elemen masyarakat, dan swasta, untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Jadi, jangan percaya bahwa Indonesia sepenuhnya gelap. Mari kita lihat sisi lainnya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Daripada kita ribut dengan urusan politik dan kepentingan, mari kita bekerjasama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi semua.

Indonesia tidak gelap, Indonesia adalah negara yang cerah, dinamis, dan penuh dengan potensi. Mari kita buat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi semua. (*)-d
*)Harman Nugroho, Aktivis Aliansi Santri Peduli Indonesia (ASPI) Yogyakarta.

Pojok KR

Tiga polisi gugur ditembak oknum TNI saat gerebek sabung ayam.

- Lawan beking judi bertaruh nyawa.

Diisukan mundur, Sri Mulyani tetap fokus jaga mandat APBN.

- Tetap berkhidmat untuk rakyat.

Sivitas akademika UGM tolak dwi fungsi TNI.

- Jangan ulang sejarah kelam.

Berabe